

BAB III

Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017

A. Pengelolaan Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya

Pariwisata merupakan sumber retribusi terhadap pendapatan daerah yang sangat potensial, hal tersebut terlihat hampir di setiap daerah mempunyai obyek pariwisata yang menjadi sorotan utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya atau menjadi ikon tersendiri dari daerah tersebut. Tidak sedikit daerah yang membentangkan lahannya menjadi lahan pariwisata dan menjadi sorotan publik wista alam. Salah satunya ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan wisata Gunung Galunggung yang menyajikan pemandangan alam dan juga udara sejuk untuk setiap wisatawan yang berkunjung kesana. Gunung Galunggung merupakan Obyek wisata teratas yang banyak diminati oleh pengunjung dibandingkan dengan obyek wisata lainnya yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Gunung Galunggung juga mampu mendatangkan bukan hanya wisatawan lokal tetapi wisatawan Internasioanal pun minat berkunjung.

Oleh karena itu peneliti mengambil obyek penelitian di wisata Gunung Galunggung dengan alasan Obyek pariwisata tersebut mempunyai rata-rata jumlah pengunjung pertahun yang paling tinggi di antara obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut berbanding lurus dengan pendapatan atau retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam proses pengelolaan yang menjadikan Gunung Galunggung sebagai destinasi wisata utama yang berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya, UPT wisata Gunung galunggung selalu berupaya

khususnya Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga serta PT Perhutani Jabar Banten memberikan pelayanan yang terbaik terhadap wisatawan yang berkunjung.

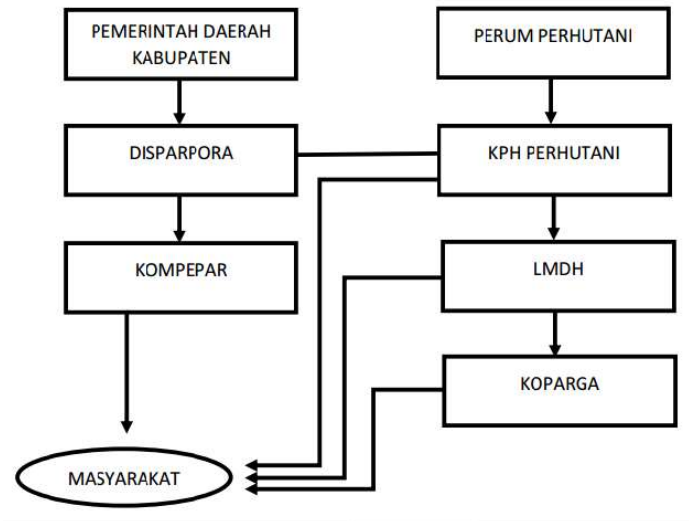
1. Pembentukan Struktur Baru Dalam Tata Kelola Pariwisata

Pembentukan struktur baru dalam tata kelola pariwisata gunung galunggung melalui kerja sama antara pihak KPH unit III Tasikmalaya yang merupakan suatu unit lembaga yang diberikan wewenang oleh perum Perhutani Jawa Barat untuk mengelola kawasan hutan lindung di Gunung Galunggung. KPH unit III ini menaungi LMDH dan Koparga. Namun Koparga dibawah naungan perhutani dengan kawasan hutan lindung dan kawasan yang dapat memberdayakan oleh masyarakat desa. Sedangkan koparga merupakan masyarakat desa yang aktif melakukan kegiatan ekonomi seperti pelaku unit usaha di sekitar kawasan wana wisata.

Pelaku usaha dibedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak DISPARPORA yang diwakilkan oleh KOMPEPAR dengan daerah berjualan di daerah milik Pemda dan KOPARGA dibawah naungan PT. Perhutani dengan daerah berjualan di lahan milik KPH Perhutani. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan wewenang kepada DISPARPORA untuk mengelola kawasan wana wisata dengan terjalin kerja sama yang menetapkan kebijakan berupa masuk kawasan wana wisata satu pintu. Hasil yang diperoleh melalui ticketing merupakan share antara KPH PT.Perhutani dan DISPARPORA.

Gambar 3.1

Bentuk Kelembagaan tata kelola baru



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (2018)

2. Pembagian Wilayah Pengelolaan Obyek Wisata

Pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan di wisata Gunung Galunggung terbagi menjadi dua bagian. Pengelola dari luas kawasan Gunung Galunggung keseluruhan yaitu 125.377 Ha, pengelola tersebut yaitu dari pihak Perhutani dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menggandeng mitra kerja dalam pengelolaan pariwistanya yaitu KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata) dan KOPARGA (Koperasi Pariwisata Galunggung) yang beranggotakan dari masyarakat sekitar wilayah Gunung Galunggung. Di bagian pertama Kawasan Wisata Galunggung/kawah Gunung Galunggung yang di kelola oleh Perhutani yaitu Luas kawasan : 124,027 Ha (Kawasan Hutan lindung : 16,527 Ha, Kawasan Wisata 58,5 Ha, Kawah : 49 Ha).

Sedangkan pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga seluas 1,5 Ha yaitu Kawasan Bak Rendam Air Panas maka dari itu ada pembagian pungutan Retribusi antara Perhutani dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang diatur dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya No.9 tahun 2011 dan SK Adm. Perhutani/ KPH Tasikmalaya No 33/kpts/TSM/III/2014 yaitu retribusi sebesar Rp 3000 untuk wilayah pengelolaan Perhutani dan untuk wilayah Pengelolaan Dinas pariwisata, Pemuda dan olahraga sebesar Rp 3000. Serta ada pungutan sebesar Rp 500 untuk jasa asuransi seperti yang terlampir gambar dibawah ini :

Gambar 3.2

Karcis Tanda Masuk Kawasan Wisata Gunung Galunggung



Sumber : Hasil Observasi di Obyek Wisata Gunung galunggung (2018)

Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat memberikan dampak positif bagi pengelolaan pariwisata. Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga serta PT Perhutani Jabar Banten dengan masyarakat akan menjamin terjadinya peningkatan dalam pendapatan maka dari itu terjalinnya kemitraan antara Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga serta Perhutani dengan masyarakat sebagai usaha untuk mewujudkan pengelolaan dan

pelayanan terbaik terhadap pengunjung wisata serta mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Tasikmalaya dalam Bidang Pariwisata.

B. Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil yang didapat yaitu kegiatan pengelolaan pariwisata yang dilakukan di Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini di Obyek wisata Gunung Galunggung telah menerapkan kemitraan atau kerjasama dalam pengelolaan pariwisatanya. Sesuai dengan teori kemitraan menurut Putra (2013) menyebutkan bahwa Kemitraan adalah suatu konsep kerjasama yang memiliki kriteria seperti dilakukan lebih dari satu pihak, mempunyai kebutuhan masing-masing, namun sepakat mencapai visi dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas. Berkaitan dengan hal tersebut sudah sesuai dengan pengelolaan pariwisata yang terjadi di Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya dimana dalam pengelolaan pariwisatanya melakukan kerjasama atau kemitraan antara Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga serta Perhutani dengan masyarakat yang mempunyai tujuan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti hasil wawancara dengan Bapak Toni staf bagian Seksi kerjasama dan kemitraan Dinas Pariwisata :

“kemitraan pengelolaan ini telah sepakat dengan Kompepar atau kelompok penggerak pariwisata sudah terjalin sejak tahun 2003 melalui penggabungan Retribusi pada bulan Maret yang telah sepakat melalui SK (Surat Keputusan) dalam bermitra untuk pengelolaan pariwisata dan pengelolaan tersebut dibagi 2 yaitu oleh DISPARPORA dan PT Perhutani Jabar banten yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut”

Dilihat dari hasil wawancara diatas dapat diketahui pengelolaan pariwisata tersebut sudah resmi menjalin kemitraan pengelolaan pariwisata yang mengharapkan dapat berdampak terhadap perubahan dalam peningkatan pendapatan daerah yang terjalin sejak tahun 2003 melalui penggabungan retribusi yang telah di sepakati melalui SK (surat keputusan).

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan pihak pengelola PT.Perhutani yang menggandeng masyarakat yang di namai Koparga mengenai terjalinnya kemitraan atau kerjasama pengelolaan pariwisata hasil wawancara oleh Bapak Totoy ketua dari Kepengurusan Koparga sekaligus Kompepar :

“Terjalannya kerjasama antara Koparga dengan perhutani dimulai kurang lebih sejak tahun 2000 pada saat itu di legalkan melalui atas dasar Keputusan Menteri Negara koperasi & Pengusaha Kecil Menengah RI No.56/BH/KDK.10.15/VIII/2000”

Dapat kita ketahui hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kemitran yang di jalankan antara pihak perhutani dengan koparga sudah terjalin sejak tahun 2000 dengan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan pengusaha Kecil Menengah RI. Dengan ini terlihat bahwa koparga dengan Perhutani sudah terjalin kerja sama atau bermitra dalam pengelolaan pariwisata gunung galunggung khususnya wilayah yang di kelola KPH perhutani guna membantu aktifitas kepariwisataan atau mengelola pariwisata gunung galunggung.

Terjalannya kemitraan antara Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga dengan masyarakat (kompepar) serta PT.perhutani dengan masyarakat (koparga) mengingat dengan adanya bentuk kontrak melauai M.O.U yang masing-masing mempunyainya kemudian ada tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitran yang diungkapkan Kuswidanti, (2008). Prinsip-prinsip ini penting di perhatikan dalam menjalin kemitraan antar pihak

bermitra karena dalam menjalin kemitraan harus melihat karakteristik dari prinsip yang dijalankan bersama.

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Dalam prinsip Kesetaraan dijelaskan bahwa harus adanya kesejajaran antara pihak yang melakukan kemitran, kesetaraan tersebut bisa diketahui melalui koordinasi dan system monitoring antar pihak bermitra. Pada pengelolaan pariwisata di Obyek Wisata Gunung Galunggung, kemitrannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip kesetaraan dimana masing-masing pihak sudah melakukan koordinasi baik antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Perhutani maupun Masyarakat.

a. Koordinasi Kemitraan

Dalam pengukuran koordinasi ini yang di ungkapkan oleh Kuswidanti, (2008) bahwa Koordinasi keterlibatan antara pihak yang bermitra serta melihat kesejajaran atau kesetaran antara pihak yang melakukan kemitraan, hal tersebut yang telah dijelaskan pada hasil wawancara dengan Bapak Toni staf bagian Seksi kerjasama dan kemitraan Dinas Pariwisata :

“koordinasi yang dilakukan antara pihak yang bermitra dalam pengelolaan pariwisata dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dengan metode sosialisasi terkait dengan kebijakan pelaksanaan program kemitraan pengelolaan pariwisata”

Dari wawancara diatas maka koordinasi yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pengelolaan pariwisata dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hal tersebut dengan adanya sosialisasi ini mengharapkan pihak mitra faham dengan tugas pelaksanaan program pengelolaan pariwisata yang dimana

koordinasi ini dilakukan atas dasar pencapaian tujuan bersama yaitu pencapaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai mana Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah terkait dengan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. dan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Penyelenggara Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- c. Pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- d. Pelaksanaan Pengelolaan UPTD
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dari tugas pokok dan fungsi di atas yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah seksi kerjasama dan kemitraan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan, pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata. Adapun rincian tugas seksi kerjasama dan kemitraan yaitu :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi kerjasama dan kemitran ;
- b. Melaksanakan pengolahan dan analisa data kepariwisataan untuk kebutuhan kegiatan kerjasama dan kemitraan pemasaran pariwisata;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama dan kemitraan pemasaran pariwisata
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dan kemitran pemasaran pariwisata
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten
- f. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kerja sama dan kemitran pariwisata
- g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup kerjasama dan kemitran;
- h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya

Dari tugas dan fungsi diatas dinas pariwisata harus menjalani teknis atau alur pelaksanaan koordinasi terkait dengan kemitraan dan kerja sama antara pihak mitra. Dalam hal ini dinas pariwisata mempunyai mitra kerja dalam pengelolaan pariwisatanya yaitu Kompepar Seperti hasil wawancara dengan Bapak Budi Prayoga staf bagian Seksi Ekonomi Kreatif terkait dengan koordinasi atau alur yang dilakukan mitra agar tercapainya tujuan sebagai berikut :

“Koordinasi yang dilaksanakan dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat ke desa, kemudian pihak desa menyampaikan ke pemerintah desa dan pemerintah desa meneruskan ke pemerintah kabupaten, begitupun pihak Perhutani”

Dari hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa alur koordinasi yang dilakukan oleh pihak bermitra yaitu dari bawah keatas. Yang telah dijelaskan di atas bahwasanya koordinasi yang dilakukan pihak dinas pariwisata dengan Masyarakat atau Kompepar itu koodinasi terkait dengan perkembangan

pengelolaan pariwisata serta masukan atau hasil pantauan monitoring akan di koordinasikan melewati alur yang sudah di jelaskan di atas. Tidak hanya pihak Pemerintah yang melaksanakan koordinasi dalam lingkup pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung Pihak PT.Perhutani juga memiliki tujuan dalam pencapaian pengelolaan terbaik khususnya di Objek Wisata Gunung Galunggung ini dimana tugas pokok dari PT. Perhutani tertulis dalam visi yaitu : Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan Visi tersebut maka misi yang harus dilaksanaka ialah:

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan berkelanjutan.Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
2. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional

Adapun tugas dari Koparga dalam melaksanaka tugas pengelolaan nya kooparga memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan atas sarana yang tersedia di obyek wisata cipanas galunggung secara profesional.
2. Melaksanakan pencatatan atau pembukuan keuangan atas pendapatan atas kegiatan kerja sama serta catatan atau pembukuan keuangan atas setoran sharing dari setiap warung makan kepada pihak PT. Perhutani.
3. Melaksanakan pembagian uang bagi hasil sesuai porsi yang diatur, kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, khusus pelaksanaan pembayaran prosentase kepada pihak PT. Perhutani yang akan transparan kepada pihak Koparga dengan menunjukkan laporan pembukuan keuangan yang di buat pihak mitra kerjadengan jadwal yang telah di sepakati.
4. Ikut berperan aktif dengan ijin dan sepengetahuan pihak PT. perhutani untuk menangani pengamanan, pencegahan kebakaranhutan, penertiban kawasan hutan, naik di lokasi yang menjadi obyek kerjasama maupun lokasi hutan sekitar.
5. Melaksana rahan dan petunjuk teknis dari pihak PT. Perhutani dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
6. Secara aktif melibatkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar lokasi dalam kegiatan kerjasama sesuai kapasitasnya.
7. Meaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana di obyek wisata yang sudah rusak, sementara masih di perlukan oleh para pangunjung wisata.
8. Secara optimal berperan aktif dalam menjaga, mengamankan dan melestarikan sumber daya alam yang ada, termasuk keindahan, kenyamanan, dan kebersihan serta sarana prasarana yang ada.

Dari tugas dan fungsi diatas maka koordinasi yang dilaksanaka oleh pihak PT.Perhutani dengan masyarakat atau koparga itu di jalankan setiap seminggu sekali dimana koordinasi tersebut membicarakan hasil pendapatan sehari dan arus kunjungan wisatawan serta koordinasi permasalahan jika ada. koordinasi tersebut di jelaskan dalam wawancara dengan bapak Ari Permana selaku pihak lapangan dari PT.Perhutani :

“koordinasi tersebut sering dilaksanakan karena kami bertekad meiliki visi untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap wisatwan terutama yang kami sering koordinasi antara koparga itu terkait dengan fasilitas untuk wisatawan dan koordinasi ini dilkukan secara bertahap melalui masukan-masukan yang harus di perbaharui yang nantinya di rundingkan atau di diskusikan dengan pihak mitra”

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwasannya pihak yang bermitra memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan asas manfaat bersama yang memiliki spirit pelayanan terbaik bagi masyarakat/wisatwan dan memiliki visi untuk memfasilitasi agar wisatawan merasa nyaman dan aman tidak hanya itu pihak PT. Perhitani koordinasi yang dilakukan yaitu dengan pemberian masukan yang nantinya menjadi bahasan pada saat musyawarah atau tahap pelaporan yang dilakukan oleh pihak mitra maupun pihak PT. Perhutani. Koordinasi ini nantinya akan dipantau atau di monitoring melalui proses tahapan akhir oleh masing-masing pihak

b. Sistem Monitoring

Pengukuran melalui sistem monitoring ini masih dalam lingkup koordinasi dan terlihat ketika kedua pihak melaksanakan kontrol lapangan Sesuai dengan teori yang di ungkapkan kuswidanti (2008) bahwa dalam pelaksanan prinsip kesetaraan dengan melauai sistem monitoring yaitu adanya koordinasi

lapangan secara langsung tanpa melihat kedudukan dengan tujuan terjalannya mitra dan mencapai tujuan yang di sepakati. Maka temuan dalam penelitian ini terkait dengan sistem monitoring ini bahwa Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selalu mengadakan pemantauan atau monitoring pada pengelolaan wisata Gunung Galunggung sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Budi :

“Kami membentuk tim sendiri untuk perihal monitoring yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan ini merupakan monitoring perkembangan hasil sementara pada pengelolaan pariwisata ”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemantauan yang dilakukan adalah tim khusus dari utusan bagian dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang di lakukan dengan system 3 bulan sekali guna menangani daya tarik wisata terutama kawasan gunung galunggung bagian bak pemandian air panas galunggung yang di kelola oleh pihak pemerintah kabupaten atau Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menggandeng Kompepar (kelompok penggerak pariwisata).

Tidak hanya Pihak Pemerintah Kabupaten saja yang melakukan pemantauan tetapi dalam pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung ini Pihak Perhutani melaksanakan monitoring tersebut sebagaimana yang di jelaskan dalam wawancara dengan bapak Ari Permana sebagai staf lapangan dari PT Perhutani terkait dengan monitoring dalam pengelolaan pariwisata:

“Tentu ada kang ! yang kami namai oleh tim SPI (Pengawas Intern). karena dengan monitoring akan terlihat pendapatan atau hasil yang dikelola oleh pihak Perhutani dengan mitra Koparga, ada beberapa tahapan untuk system pemantauan pelaporan kami yaitu ada dalam jangka per periode yaitu 1 tahun sekali, per 2 (dua) minggu dan per jam 16.00 atau jam 4 sore agar terlihat naik turunnya wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata “

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pihak perhutani memiliki strategi khusus dalam system pengelolaan kedalam bentuk pelaporan untuk terciptanya pengelolan yang terstruktur dan tentunya memiliki tujuan yaitu meningkannya pendapatan serta meningkatnya daya Tarik wisatawan, dengan system per periode 1 tahun sekali yang telah di jelaskan dengan tahap ini memiliki pelaporan jangka panjang yang nantinya menjadi laporan kepada pihak Dinas atau pemerintah kabupaten yang di kalkulasikan menjadi pendapatan asli daerah khusus yang di kelola pihak PT. Perhutani dengan Koparga, untuk pelaporan per dua minggu yang sudah di jelaskan bahwa pelaporan tersebut akan melihat jangka menengah naik turunnya wisatawan serta per jam 16.00 akan menjadi tolak ukur perhutani bahwa pendapatan hasil perhari akan terlihat jelas kunjungan wisatawan di gunung galunggung khususnya lahan Kawah Gunung Galunggung.

Dari hasil wawancara diatas memberikan informasi mengenai bagaimana alur yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata dengan hasil peneliltian menjelaskan bahwa alur koordinasi ini adalah sebagai indikator pengukuran dari prinsip kesetaraan dan hasilnya sudah terbukti bahwa alur koordinasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pihak mitra dengan pihak dinas maupun pihak PT. Perhutani. Alur koordinasi tersebut dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang disepakati oleh 2 belah pihak yang merupakan pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung.

2. Prinsip Azaz Manfaat Bersama (*mutual benefit*)

Pada prinsip manfaat bersama ini yang di kemukakan oleh kuswidanti (2008) yaitu melihat kedua pihak yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat yang sesuai kontribusi masing-masing kegiatan atau pekerjaan menjadi efisien dan efektif apabila dilakukan bersama. Sesuai dengan temuan dalam penelitian bahwa kemitraan yang sudah dilaksanakan dalam pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung, prinsip tersebut sudah menerapkan dalam kemitraannya. Dimana manfaat tersebut akan berbeda-beda bagi pihak mitra dalam pengelolaan pariwisata manfaat yang didapat sesuai dengan Adendum Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan Koperasi Pariwisata (Koparga) Nomor 009/PKS KBM-WJL.I/2017. Maupun Pemerintah Kabupaten dengan Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar).

a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak Mitra (Kompepar)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang di utarakan oleh Bapak Budi :

“Manfaat yang didapat pemerintah baik desa maupun pemerintah kabupaten (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di desa selain itu juga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat dalam pemberdayaan atau keterlibatan pengelolaan pariwisata”

Dari hasil wawancara tersebut dapat memberikan informasi bahwa manfaat dari kemitraan ini akan berdampak positif bagi pemerintah kabupaten selain dari meningkatnya pendapatan asli daerah, masyarakat sekitar juga dapat

di berdayakan sebagai pengelolaan pariwisata dan akan menimbulkan sejahteranya masyarakat sekitar.

Manfaat tersebut juga dirasakan oleh pihak mitra sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Kompepar yaitu dengan bapak Totoy :

“Manfaat yang dirasakan tentu ada kang terutama penyerapan tenaga kerja dan dilibatkannya kami masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dalam hal kebersihan dan keamanan di sekitar pariwisata kami merasa terbantu dengan adanya mitra kerja dengan pihak pemerintah, namun sangat disayangkan pengelolaan tersebut tidak semua kami yang tangani tertama lahan parkir yang dikelola langsung oleh pihak dishub atas kebijakan dari pihak pemerintah kabupaten yang di mitrakan melalui DISPARPORA”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerjalah yang memberikan dampak positif bagi warga di sekitaran objek wisata Gunung Galunggung, namun ada hal yang memberikan informasi terkait pembebasan lahan yang ingin di kelola langsung oleh pihak Kompepar. Hal ini seharusnya Dinas Parwisata lebih detail dalam perihal pemberian hak pengelolaan atau pembuatan kebijakan dalam lingkup sosialaisi terhadap kelompok penggerak pariwisata selaku mitra kerja dari dinas pariwisata. Adapun pembagian hasil yang di laksanakan pada pihak mitra dengan Pemerintah Kabupaten seperti yang di utarakan pihak Dinas Pariwisata oleh Bapak Juanda UPT lapangan terkait besaran Hasil yang didapat :

“Untuk pembagian pengelolaan itu kami membuat kesepakatan sesuai surat perjanjian yaitu pihak Mitra atau kompepar sebesar 30% dan kami pihak Pemerintah Kabupaten sebesar 70%”

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan Kompepar ada sistem bagi hasil dalam pengelolaa nnya yaitu 30% untuk pihak mitra 70% untuk Pihak Pemerintah

Kabupaten hal ini memberikan hal positif bagi masyarakat atau Kompepar karena dengan adanya keterlibatan pengelolaan pariwisata dengan system bagi hasil ini merupakan perjanjian yang di sepakati bersama dan akan memberikan efek positif bagi pihak mitra.

Maka terlihat ketika terjalinnya kemitraan dilakukan dan manfaat yang diperoleh itu berdampak positif serta kegiatan sesuatu hal yang menjadi lebih efisien dan efektif dan hal tersebut terlihat ketika di teliti sesuai data lapangan yang sudah dilaksanakan di berbagai sumber dengan adanya pekerjaan baru dan pembagian penghasilan ini menjadi data kuat ketika manfaat itu di peroleh ke dua pihak.

b. Manfaat Bagi PT. Perhutani dan Pihak Mitra (Koparga)

Hal serupa dirasakan oleh pihak PT.Perhutani Jabar Banten terkait dengan manfaat kemitran yang dirasakan oleh pihak Perhutani dengan Koparga Hasil wawancara tersebut dengan Bapak Ari Permana sebagai staf lapangan dari PT.Perhutani yaitu :

“sangat bermanfaat banget kang jika kita lihat perkembangan pengelolaan dari tahun ketahun itu banyak sekali perubahan itu bertanda bahwa system pengelolaan kami akan terus berupaya supaya lebih baik lagi dimana dengan contoh tentang kebersihan, keamanan itu sudah dirasakan oleh kami pihak perhutani dengan adanya kemitran dengan Koparga ini”

Terlihat dari hasil wawancara diatas bahwa pihak perhutani memberikan apresiasi terhadap kemitraan yang dilakukannya dalam pengelolaan dengan adanya kemitraan yang sudah dilaksanakan dengan contoh yang sudah dijelaskan menandakan sudah terorganisirnya system pengelolaan yang terkelola dengan baik. Adapun pendapat dari masyarakat pengelolaan pariwisata (KOPARGA)

yaitu wawancara dengan Bapak Sopyan selaku Staf mitra Perhutani terkait dengan manfaat yang dirasakan yaitu :

“Sangat bermanfaat kang kembali lagi ke penyerapan tenaga kerja dimana pihak perhutani memberikan kesempatan kerja kepada penduduk di sekitaran galunggung untuk bisa mengelola dan membuka warung disekitaran wisata dan di beri lahan sewaan dengan harga terjangkau denga serapan tenaga kerja kurang lebih 100 warga yang terlibat merasa senang dari mulai dijinkannya berdagang pun kami merasa terbantu ”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu penyerapan tenaga kerja terlebih masyarakat sekitar merasa terbantu karena diberikannya ijin usaha, diberi lahan sewaan dengan harga terjangkau. Adapun yang dijelaskan pada Adendum Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan Koperasi Pariwisata (Koparga) Nomor 009/PKS KBM-WJL.I/2017. Menyatakan bahwa perjanjian kemitraan tersebut ada pembagian hasil sesuai pada pasal 4 yaitu besaran hasil kerjasama : pengelolaan bak rendam, pengelolaan parkir, pengelolaan lokasi perkemahan, pengelolaan fasilitas kesenian dan pengelolaan persewaan banrenang maka diatur dan di sepakati pembagian sebagai berikut :

- a. Pihak PT. Perhutani : sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- b. Pihak Mitra (koparga) : sebesar 30% (tiga puluh persen)

Dapat kita ketahui data diatas menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut dalam system bagi hasil melalui perjanjian yaitu pihak mitra mempunyai hak pengelolaan besaran pendapatan yang akan di miliki adalah sebesar 30% sedangkan pihak PT.Perhutani sebesar 70% dengan kesepakatan tersebut pengelolaan pariwisata di Gunung galunggung khususnya wilayah Kawah

Gunung Galunggung serta bak rendam air panas yang di bagi menjadi : pengelolaan bak rendam, pengelolaan parkir, pengelolaan lokasi perkemahan, pengelolaan fasilitas kesenian dan pengelolaan persewaan ban renang.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa prinsip manfaat bersama atau (*mutual benefit*) sudah memberikan bukti terhadap pengelolaan di Obyek Wisata Gunung galunggung ini terlebih dalam pengelolaan tersebut memiliki manfaat yang begitu besar terhadap masyarakat hasil tersebut menunjukkan bahwa terserapnya tenaga kerja di lingkungan masyarakat desa linggajati atau sekitaran Gunung Galunggung adalah manfaat yang paling di rasakan oleh pihak masyarakat dan hal tersebut dirasakan oleh pihak pemerintah bukan hanya mengurangi kemiskinan dan pengangguran tetapi dengan adanya kerjasama atau kemitraan yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan upaya peningkatan pendapatan asli daerah khususnya wisata gunung galunggung tidak hanya itu dapat disimpulkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten dan Pihak Mitra (Kompepar) memiliki kesepakatan bagi hasil yaitu 70% pihak Pemerintah Kabupaten dan 30% pihak Mitra (Kompepar) begitupun sama halnya dengan pihak PT Perhutani dengan (Koparga) .

3. Prinsip keterbukaan (*transparansi*)

Pada prinsip ini sesuai dengan teori Kuswidanti, (2008) bahwa prinsip ini melihat dengan cara pengelolaan kegiatan apakah pengelolaan kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai aturan yang disepakati atau belum maka dapat terlihat dengan melalui transparansi kegiatan pengelolaan pariwisata dan hasil kegiatan pengelolaan. Sesuai hasil penelitian bahwa prinsip Keterbukaan sudah dijalankan

oleh masing-masing pihak terutama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) dimana hal ini adalah prinsip yang sangat berpengaruh terhadap transparansi antara pihak pengelola. Dan pihak pengelola sudah menjalankan prinsip keterbukaan tersebut sesuai dengan temuan dalam penelitian ini melalui :

a. Transparansi Kegiatan Pengelolaan pariwisata

Melalui transparansi ini menyebutkan bahwa dalam teorinya kuswidanti, (2008) bahwa akan terlihat aktifitas hasil pengelolaan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh semua pihak. Sesuai dengan temuan pada penelitian seperti yang di utarakan oleh bapak budi selaku staf ekonomi kreatif di bidang pariwisata terkait dengan keterbukaan antara pihak pengelola :

“Sangat terbuka dan transparansi terkait dengan semua aktifitas pengelolaan dengan contoh pemungutan retribusi yang dicantumkan pada tiket masuk wisata gunung galunggung untuk setiap pengunjung”

Dari hasil wawancara diatas menandakan bahwa saling terbukanya antar pihak akan mengantarkan kepada hasil terbaik terhadap pengelolaan pariwisata di gunung galunggung dimana program yang sudah di susun demi lancranya pengelolaan pihak pemerintah sudah mengupayakan sedemikian rupa terkait keterbukaan seluruh aktifitas pengelolan pariwisata dan yang dilakukan pihak dinas pariwisata yaitu terbukanya system ticketing yang di sepakati melalui tiket masuk atau karcis yang dikelola bersama yaitu pihak pemerintah Kabupaten maupun perhutani dengan masyarakat (kompepar dan koparga) tidak hanya itu pihak dinas terbuka dalam segala aktifitas lainnya yang menyangkut dengan pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung.

Sedangkan PT Perhutani Jabar Banten dalam wawancara dengan bapak Ari Permana adalah :

“Kami sangat terbuka khususnya dalam mementingkan Good Governance dengan mitra KOPARGA dalam melaksanakan pengelolaan pariwisata ini dimana tugas kami adalah melayani masyarakat dan mengelola supaya lingkungan gunung galunggung aman, tertib, bersih dan terjaga ke alamiannya”

Wawancara diatas memberikan informasi terhadap keterbukaan mitra dengan pihak perhutani adanya prinsip menjaga lingkungan dan memberikan pelayanan terbaik, mengkoordinasi, membina dan mengawasi terhadap pengelolaan pariwisata dan hal tersebut sangat terbuka mengingat dalam hal ini good governance adalah prinsip dari PT. Perhutani dalam pencapaian kerjasama dan pelayanan terhadap wisatawan guna memberikan dampak terbaik bagi daya Tarik wisata yang berdampak secara khusus yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya.

b. Hasil Kegiatan Pengelolaan Pariwisata

Dengan adanya pengelolaan pariwisata tersebut maka yang akan di selaraskan dengan aktifitas kegiatan pengelolaan adalah system pelaporan kerja terhadap pengelolaan pariwisata, dalam hal ini pihak PT Perhutani memiliki tugas untuk system pelaporan terkait dengan pengelolaan pariwisata. Hasil wawancara dengan pihak pemerintah kabupaten (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) oleh bapak budi terait laporan pengelolaan :

“Ada pelaporan dan bentuknya itu adalah pelaporan berupa pendapatan yang dihasilkan dan itu menjadi tolak ukur untuk pendapatan asli daerah setiap tahunnya namun pelaporan khusus untuk PAD setiap bulan selalu ada laporan”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pengelolaan pariwisata sangat lah penting seperti halnya yang dilakukan oleh pihak

PT perhutani yang nantinya menjadi tolak ukur pendapatan Asli Daerah dan itu di lakukan setiap setahun sekali dengan system pelaporan jangka panjang tidak hanya pelaporan dalam jangka panjang tetapi yang dilaksanaka pelaporan tersebut setiap bulan pun pihak PT. Perhutani memberikan laporan terkait pendapatan atau hasil dari kunjungan arus wisatwan yang mengunjungi wisata gunung galunggung Adapun pelaporan mitra kerja kepada pihak PT Perhutani untuk menganalisi wisatawan yang mengunjungi ke gunung galunggung dimana hasil wawancara dengan Bapak Ari Permana :

“Pelaporan itu pasti ada kang yang terdiri dari per periodesasi, min per 2 dua minggu sekali, dan per jam 16.00/ perhari dimana pelaporan ini meliputi pelaporan retribusi, wisatawan masuk jumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2”

PT Perhutani berdasarkan hasil wawancara yaitu, memberikan pelaporan khusus untuk pelaporan wisatawan masuk, kendaraan masuk serta retribusi yang didapatkan dalam jangka panjang, menengah maupun pendek. Sehingga PT Perhutani mengetahui perkembangan arus wisatawan masuk yang berkujung ke Gunung Galunggung yang nantinya akan di laporkan secara formal kepada Pemerintah Kabupaten. Pelaporan tersebut sebagai simbol bahwa perkembangan setiap hari setiap minggu bahkan tahun akan berubah.

Dalam hal keterbukaan tidak hanya system pelaporan saja antar pihak juga harus mengevaluasi atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan pariwisata di Obyek Wusata Gunung Galunggung. Adapun Terkait dengan keluhan dari mitra pengelolaan (masyarakat) sebagaimana dalam hasil wawancara terkait dengan keluhan dari pihak pemerintah Kabupaten terhadap mitra kerja oleh bapak budi :

“Untuk keluhan yang dialami itu tidak ada dan semuanya baik-baik saja”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan atau keluhan yang dirasakan pihak pemerintah dalam hal ini adalah pembuat kebijakan sama sekali tidak ada permasalahan serius atau permasalahan khusus terlebih pengelolaan tersebut tidak semua di berikan kepada pihak mitra dimana dalam wawancara dengan pihak mitra di ungkapkan oleh Kelompok Penggerak pariwisata (kompepar) yaitu bapak Totoy selaku Ketua Kompepar :

“Keluhan yang dirasakan oleh kami adalah ketidak percayaannya kepada kami perhal pembebasan lahan parkir yang diinginkan oleh kami itu mengelola sekaligus yang memperhatikan terhadap keamanan parkir sekitaran bak rendam air panas”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa keluhan yang dirasakan oleh pihak mitra adalah perihal kepercayaan terhadap mitra dalam pengelolaan parkir sekitaran wisata yang di kelola oleh DISPARPORA yang menggandeng DISHUB Kabupaten Tasikmalaya untuk mengelola lahan parkir tersebut dan hal ini seharusnya pihak pemerintah memiliki upaya lain atau terobosan agar masyarakat sekitar bias lebih diberdayakan dalam hal pembebasan lahan parkir tersebut mengingat keputusan dan pembuat kebijakan semua diserahkan kepada pihak pemerintah maka yang di permasalahan disini adalah ketidak percayanya terhadap pengelolaan lahan parkir.

Keterbukaan dalam kerja sama merupakan hal yang sangat penting dengan hasil wawancara diatas menandakan bahwa keterbukaan dalam hal permasalahan terkait dengan kemitraan pada pengelolaan pariwisata di gunung galungggung ini sudah terbukti tidak ada masalah dimana pada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pariwisata tidak ada keluhan atau permasalahan yang serius terhadap permasalahan dari pengelolaan wisata Gunung Galungggung.

Adapun hasil wawancara dengan Pihak PT Perhutani oleh bapak Ari Permana terkait dengan keluhan antara PT.Perhutani dengan pihak Mitra yaitu Koparga sebagai berikut :

“Terkait dengan keluhan itu tidak ada kang, karena kami sudah mempunyai SK yang mengatur terkait dengan tugas dan fungsi kami dalam kepariwisataan dan selama ini kami aman-aman saja selagi itu tidak ada yang salah dalam pelaksanaan kami rasa itu baik-baik saja”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dalam penanganan permasalahan antar pengelola sudah terjalin dengan baik dan tidak ada masalah apapun dalam pengelolannya dengan adanya SK yang mengatur bahwa pengelolaan tersebut sudah tertera aturan yang kuat dalam system tata kelola pengelolaan pariwisata dengan itu menyatakan bahwa setiap pengelola dari PT. Perhutani maupun Koparga sudah jelas dan terkelola dengan adanya SK dan M.O.U yang di sepakati oleh Pihak Perhutani dengan Pihak mitra yaitu Koparga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengukur kemitraan dengan melalui prinsip keterbukaan dapat diambil garis besar bahwasannya pengelolaan dengan bermitranya atau keterlibatan pengelolaan dengan masyarakat sudah terlihat jelas terbuka dengan berbagai aspek yang telah di paparkan diatas yaitu terkait Keterbukaan Retribusi, Perjanjian Kontrak Kerja (M.O.U), Kegiatan Kepariwisataan, Tugas atau Fungsi Pengelola, Pelaporan, serta Keluhan atau Permasalahan yang di rasakan antar pihak.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut berjalan dengan baik terkait kemitraan pengelolaan pariwisata di objek wisata gunung galunggung kabupaten tasikmalaya ketiga prinsip tersebut yaitu prinsip kesetaraan, prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*) dan prinsip keterbukaan ketiga prinsip tersebut

sudah cukup membuktikan bahwa pada pengelolaan pariwisata di gunung galunggung telah mengajak pemerintah dan masyarakatnya untuk ikut berperan dan terlibat dalam proses kegiatan pariwisata yang berjalan dengan menerapkan kemitraan.

Kemudian dengan adanya kemitraan yang telah dilaksanakan adanya manfaat yang didapat saat melakukan kemitraan maka masing-masing pihak menginginkan adanya lanjutan kegiatan kemitraan tersebut. Seperti temuan pada penelitian bahwa sanya masing-masing pihak menjelaskan keberlanjutan kemitraan yang nantinya akan dilakukan yaitu sesuai dengna berjalannya perkembangan aktifitas pengelolaan pariwisata di objek wisata Gunung Galunggung.

Menurut masing-masing pihak dalam hal ini baik pemerintah kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga, Perhutani maupun masyarakat sama-sama menilai bahwa selama adanya pengembangan pariwisata disana otomatis kemitraan ini akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan kesepakatan yang telah di buat, selain itu masyarakat yang bermitra juga menginginkan adanya keberlanjutan kemitraan yang sudah dijalin dengan pihak Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga maupun Perhutani yaitu memperpanjang surat perjanjian atau perpanjangan M.O.U dengan kesepakatan saat awal melakukan kemitraan.

C. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya perubahan dan

pengembangan sektor pariwisata. Dengan harapan sektor pariwisata akan menyumbang kontribusi yang lebih besar lagi nantinya untuk PAD.

Seperti penjelasan pada bab-bab diatas yang telah memaparkan apa saja yang menjadi dasar untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pengelolaan pariwisata dan apa saja yang menjadi keunggulan dalam menata kemitran dan kerja sama pada pengelolaan pariwisata yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata khususnya dari Obyek Wisata Gunung Galunggung. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan Pendapatan Retribusi yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Gunung Galunggung dengan hal tersebut maka faktor utama dari retribusi tersebut hasil pengelolaan yang baik menata dan memberikan pelayanan baik bagi wisatawan dengan melalui kemitraan merupakan terobosan untuk melakukan pelaksanaan pengelolaan yang terstruktur dan terkelolanya pariwisata yang aman, nyaman serta menmbahnya Daya Tarik Wisata yang dapat mempengaruhi penambahan kunjungan wisata yang tentunya akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah pada sektor wisata khususnya di Obyek Wisata Gunung Galunggung. .

Dalam hal ini yang mempunyai wewenang pada usaha untuk meningkatkan PAD dari sektor Pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Disparpora Kabupaten Tasikamalaya merupakan dinas yang membawahi langsung UPT wisata Gunung Galunggung. Dinas ini mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan terkait dengan pengelolan dan pengembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Obyek Wisata Gunung Galunggung ini yang mana sudah

di jelaskan pada bab-bab diatas upaya terjalannya kemitraan terlihat dari sistem koordinasi, sistem monitoring, pembagian hasil, manfaat bermitra, transparansi kegiatan pengelolaan, dan sistem pelaporan merupakan upaya peningkatan pengelolaan agar terciptanya wisata yang aman serta menarik wisatawan berkunjung ke wisata Gunung Galunggung. Adapun data hasil dari pengelolaan pariwisata melalui retribusi yang masuk ke wisata Gunung Galunggung yang menjadi tolak ukur dari retribusi tersebut adalah Arus Kunjungan wisata dan Realisasi Target Pendapatan.

1. Retribusi Daerah

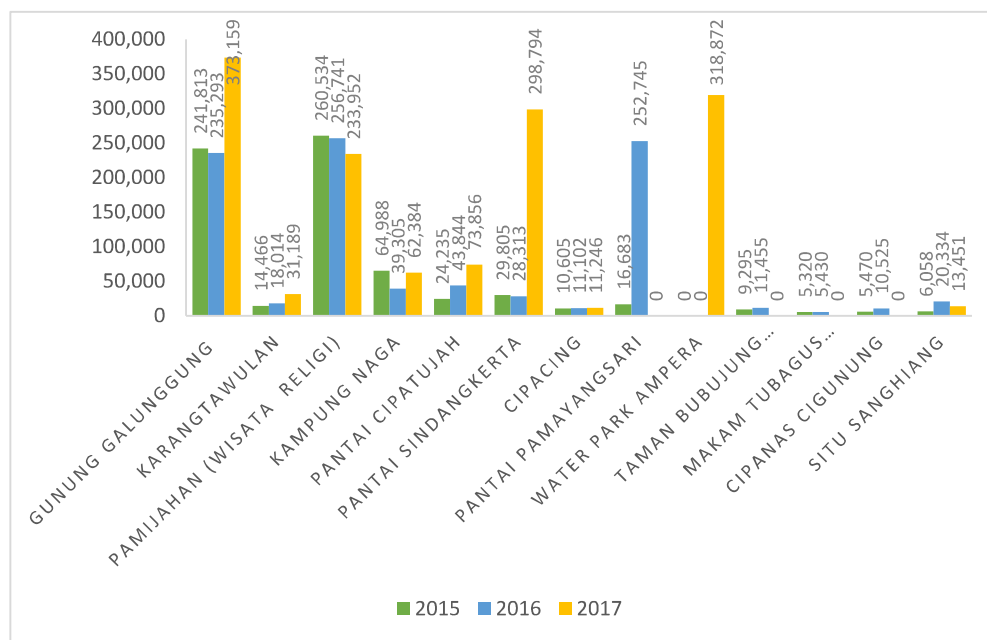
Obyek wisata Gunung Galunggung merupakan obyek wisata yang menjadi sorotan publik pertama dalam kunjungan di Kabupaten Tasikmalaya dibandingkan obyek wisata yang lain sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 6 tentang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah dengan itu maka retribusi yang masuk akan mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam sektor pariwisata melalui tolak ukur Arus Kunjungan dan Realisasi Target Pendapatan asli daerah.

a. Arus kunjungan Wisata

Retribusi daerah ini dapat kita lihat melalui jumlah pengunjung yang datang ke Obyek Wisata Gunung Galunggung dan realisasi target PAD. Berikut Grafik data arus kunjungan wisatawan yang berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Kabupaten Tasikmlaya berikut Grafik 3.1 dibawah ini :

Grafik 3.1

Data Kunjungan Arus Wisatawan Yang Berkunjung Ke Beberapa Destinasi Wisata Di Kabupaten Tasikmalaya 2015 – 2017



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya (2018)

Dapat kita lihat dari data yang telah diperoleh dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, bahwa terjadi Penurunan kunjungan wisatawan ke Wana Wisata Gunung Galunggung dari tahun 2015 sampai 2016 sebanyak 6,52 persen dengan penurunan pertumbuhan kunjungan menurun sebesar 0,42 persen, Namun terjadi kenaikan kunjungan wisatawan dari tahun 2016 menuju tahun 2017 sebanyak 137,866 dengan peningkatan pertumbuhan kunjungan sebesar 37.02 persen.

Dilihat dari data kunjungan wisatawan yang berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat adanya fenomena

kunjungan wisatawan yang fluktuatif ke kawasan Gunung Galunggung. Dapat kita lihat bahwa di Obyek Wisata Gunung Galunggung terdapat peningkatan kunjungan wisatawan dari tahun 2016-2017, namun terdapat penurunan kunjungan wisatawan pada tahun 2016. Apabila kita lihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan pada 2 tahun kebelakang ini yaitu pada tahun 2015-2016, maka arus kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Wana Wisata Gunung Galunggung terlihat menurun.

Dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Wana Wisata Gunung Galunggung setiap tahunnya maka akan berdampak pada kurang nyamannya wisatawan saat melakukan kunjungan wisata ke Kawasan Gunung Galunggung. Seperti kita ketahui bersama bahwa Gunung Galunggung merupakan suatu kawasan wisata alam yang sangat rentan akan kerusakan sehingga perlu adanya pembatasan jumlah pengunjung jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) kawasan Gunung Galunggung.

Dengan adanya penurunan pada tahun 2015-2016 tentunya pemerintah kabupaten yang di wakikan oleh Dinas Pariwisata harus gencar menganalisis sebab dari hal tersebut dan hal itu disebabkan oleh daya Tarik wisata serta faktor yang mendukung yaitu sarana prasarana yang mana dalam wawancara dengan pihak dinas pariwisata oleh bapak budi prayoga terkait dengan yang harus dibenahi dalam pengembagn pariwisata :

“Terkait dengan pembedahan pariwisata kami sudah membuat rencana pembangunan pariwisata khususnya di gunung galunggung ini serta memfokuskan pada fasilitas sarana dan prasarana bagi pengunjung wisata dan fasilitas fasilitas wisata hanya untuk kepentingan dan kenyamanan wisatawan tidak hanya itu kami berupaya agar pengelola

pariwisata mempunyai penanganan bagi wisatawan untuk melayani sebaik-baiknya ”

Dari wawancara diatas maka dapat kita ketahui bahwa fasilitas umum untuk kepentingan wisatawan sangat di perlukan maka yang terdapat hasil wawancara tersebut ialah pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah dinas pariwisata gencar memberikan pelayanan terbaik dengan membuat rencana pembangunan fasilitas dalam menunjang kepuasan wisatawan hal tersebut bisa kita lihat dengan wisata alam di kota dan kabupaten di Indonesia yang semakin majunya zaman dan semakin banyak pembaharuan atau inovasi serta fasilitas yang di sediakan oleh pihak pemerintah atau UPT pengelola pariwisata dengan adanya hal tersebut maka pemerintah berupaya untuk membenahi pengembangan sektor wisata dengan melalui membenahan pengelolaan pariwisata serta fasilitas yang diperlukan wisatawan dalam hal ini hasil wawancara dengan bapak budi prayoga terkait upaya yang dilakukan dalam pengembangan daya Tarik wisata :

“Upaya yang kami lakukan terhadap pengembangan wisata itu diantaranya kami membuat even pariwisata dimana even itu untuk mengenang meletusnya gunung galunggung dan upaya ini adalah upaya pengembangan pariwisata yang akan berpengaruh dengan pendapatan asli daerah hal ini di libatkan semua pengelola termasuk dengan mitra kerja dalam pengelolaan”

Dari hasil wawancara diatas maka pengembangan wisata yang menjadi program atau salah satu upaya dalam pengembangan untuk meningkatkan daya tarik dan sekaligus akan membrikan dampak peningkatan pendapatan asli daerah adalah mengadakan even pariwisata salah satunya ialah mengenang meletusnya gunung galunggung dan ini merupakan tugas dari Dinas Pariwisata dalam upaya meningkatkan daya

Tarik serta pendapatan asli daerah mengingat dengan tugas dan fungsi dinas pariwisata tersebut yaitu membrikan kebijakan terkait kepariwisataan dilibatkannya mitra akan lebih terkelola dengan system pelayanan bagi wisatwan yang berkunjung ke Obyek Wisata Gunung Galunggung.

Dengan hal diatas maka tidak di pungkiri bahwa pengelolaan pariwisata merupakan hal utama dalam upaya menarik wisatawan agar merasa nyaman dan aman ketika berkunjung yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang sudah dipaparkan diatas bahwa dalam hal ini pihak Pemerintah Kabupaten dan perhutani menggandeng masyarakat untuk membantu mengelola ruang lingkup kemitraan yaitu bermitra dengan kompepar dan koparga agar pengelolaan tersebut bisa berkembang dan memberikan dampak baik bagi peningkatan dalam penataan pengelolaan, menambah dan terkelolanya daya Tarik yang berinovasi , pengembangan fasilitas yang berpengaruh dalam minatnya pengunjung wisata yang akan berdampak terhadap pendapatan yang akan dihasilkan dari system pengelolaan tersebut.

b. Realisasi target Pendapatan Asli Daerah

Dari pengelolaan tersebut yang di laksanakan oleh dinas pariwisata maupun perhutani dengan masyarakat akan terlihat dengan adanya data arus kunjungan di obyek wisata gunung galunggung pendapatan yang dihasilkan dalam sektor pariwisata juga sangat memberikan bukti bahwa system pengelolaan yang di laksanakan di obyek wisata gunung galunggung tersebut bisa terlihat melalui pendapatan atau hasil dari pendapatan retribusi obyek

wisata tersebut yaitu retribusi yang di pungut atas pengelolaan pariwisata. Adapun realisasi pendapatan sektor pariwisata di Obyek wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya berikut tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2017

No	Wana Wisata	Target dan realisasi	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Kawasan Wisata Galunggung	Target	468.000.000	468.000.000	575.000.000
		Realisasi	642.142.000	557.501.000	616.754.000
2	Bak Rendam Air Panas Galunggung	Target	35.000.000	35.000.000	55.000.000
		Realisasi	58.783.000	61.254.000	73.763.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya (2018)

Dapat dilihat data diatas bahwa adanya peningkatan jumlah pendapatan wisata pemandian air panas yang signifikan pada tahun 2015 hingga 2017. Namun juga terjadi penurunan pendapatan yang dialami oleh kawasan wisata gunung galunggung pada tahun 2015 hingga 2016 sebesar 84.646.000 meskipun pada tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi jumlah dari tahun 2015 hingga 2017 sangat tipis angka kenaikan pendapatan. Yang merupakan dampak dari berkurangnya jumlah pengunjung seiring dengan di naikkannya tarif atau retribusi masuk ke wana wisata gunung galunggung pada tahun 2017.

Obyek wisata gunung galunggung merupakan obyek wisata yang memiliki retribusi dalam bidang tempat rekreasi dan olahraga terbesar di Kabupaten Tasikmalaya disbanding dengan obyek wisata kedua teratas yaitu pamijahan (wisata religi) gunung galunggung tercatat pada tahun 2017 per desember mencapai angka

Rp **616.754.000** pemasukan pada pendapatan PAD. Dengan jumlah pengunjung 373,159 pengunjung yang datang di Obyek wisata Gunung Galunggung yang di bantu oleh pendapatan retribusi dari pemandian air panas galunggung yang di kelola oleh pemerintah kabupaten per desember tercatat pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai angka Rp **73.763.000** dari target Rp **55.000.000** hal ini yang di sebabkan daya Tarik wisata gunung galunggung memiliki ciri khas yang menonjol selain dari kawah gunung galunggung yaitu air pans alami.

Dengan pengelolaan yang semakin ketat dan teratur dengan banyaknya upaya program kegiatan pengelolaan yang dijalankan dan akan mempengaruhi terhadap minatnya pengunjung. Terjalannya kerjasama pengelolaan ruang lingkup kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, Perhutani dengan Masyarakat juga memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepariwisataan di obyek wisata gunung galunggung.

Perlu kita ketahui Gunung Galunggung dengan keindahan alam yang mampu mendatang kan banyak wisatawan yang mempunyai daya Tarik tersendiri dibandingkan dengan obyek wisata lainnya seperti yang dikatakan oleh bapak Ari Permana selaku Staf lapangan dari Pt Perhutani Jabar banten :

“daya tarik wisata gunung galunggung sangat besar kang diantaranya kawahnya yang eksotis,mengingat memory meletusnya gunung galunggung, air panasnya yang alami”

Hal yang sama dikatakan oleh bapak Budi Prayoga selaku bagian ekonomi kreatif dibidang kepariwisataan :

“daya Tarik gunung galunggung menjadi nilai historis letusan gunung galunggung, airnya yang mengandung zat yang mampu menyembuhkan penyakit yang menjadi daya Tarik utama bagi pengunjung”

Sedangkan menurut kepala bagian bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yaitu bapak H. Epi Hepi :

“Gunung galunggung merupakan pariwisata yang didanai khusus pengelolaannya karena gunung galunggung ini menjadi ikon Kabupaten tasikmalaya dan tujuan pemerintah kabupaten yang menjadi titik fokus pengembangan wisata dengan deretan no 1 diantara karangtawulan dan kampung naga yang mempunyai slogan Tasik Siap dan Piknik Di Tasik menjadi semangat kami karena kami punya wisata Budayanya Kampung Naga, Brandingnya Rajapolah dan Ikon Tasik Adalah Galunggung”

Dari hasil wawancara tersebut memberikan informasi bahwa Gunung Galunggung merupakan obyek yang strategis untuk di kembangkan dengan berbagai keunikan dan nilai historis yang sangat menakjubkan. Karena dengan semakin baik pemerintah Kabupaten Tasikmlaaya dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dalam mengembangkan dan menata pengelolaan yang baik pada obyek wisata Gunung Galunggung maka akan semakin banyak juga wisatawan yang datang dan menjadikan peningkatan retribusi dan olahraga sebagai sumber penerimaan PAD Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui DISPARPORA sebagai SKPD yang membawahi urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan ini memiliki wewenang melalui kepala bidang pariwisata untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pariwisata dengan metode atau cara kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat melalui pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata. Sementara itu UPT wisata Gunung Galunggung adalah tim pelaksana yang ada di lapangan. UPT wisata Gunung Galunggung hanya bisa memberikan usulan mengenai apa-apa yang harus dilengkapi atau di perbaharui

di lokasi wisata gunung galunggung yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh dinas terkait.

Dapat terlihat dari pemaparan diatas bahwa kemitraan pengelolaan pariwisata antara pemerintah kabupaten, perhutani dengan masyarakat di Obyek Wisata Gunung Galunggung merupakan terobosa yang memberikan pengaruh besar terhadap hasil Pendapatan Asli Daerah. Terlihat pada realisasi pendapatan tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terlebih dalam system pengelolaannya yang baik UPT wisata Gunung Galunggung selalu ber upaya untuk menjadikan Wisata Gunung Galunggung adalah obyek wisata yang di kenal masyarakat luas dengan berbagai even atau kegiatan memberikan daya tarik bagi wisatawan serta dengan memberikan fasilitas yang terbaik dan juga memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Gunung Galunggung yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi / pungutan pemasukan terhadap Wisata Gunung Galunggung.